

KOMPONEN	INDIKATOR	NO	BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN	FOTO / LINK 2024	FOTO / LINK 2023	FOTO / LINK 2022	FOTO / LINK 2021
I Penguatan Tata Laksana	1.1 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)	1	RPJMDes	<a href="#">rpjmdes</a>	RPJMDes 2023-2028	RPJMDes 2017-2022	
		2	RKPDDes	<a href="#">rkpdes</a> <a href="#">apbdes</a>	<a href="#">perdes</a> <a href="#">perdes</a>	<a href="#">perdes</a> PERDES	<a href="#">rkpdes 2021</a> <a href="#">APBDes 2021</a>
		3	APBDes	<a href="#">perpet pjbran apbdes</a>	<a href="#">perpet penjabaran 2023</a>	<a href="#">perpet penjbran 2022</a>	
		4	APBDes perubahan		<a href="#">perdes</a>	<a href="#">perdes</a> <a href="#">perdes</a>	<a href="#">perdes</a>
					<a href="#">perpet perub I pejbran</a> <a href="#">perpet perub II penjbran</a>	<a href="#">perpet perub I</a> <a href="#">perpet perub II</a>	
		5	Laporan Pertanggungjawaban	<a href="#">lap pertggrjwban</a>	<a href="#">link disini</a>	<a href="#">link disini</a>	<a href="#">link disini</a>
		6	Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparat desa		<a href="#">rkpdes</a> <a href="#">apbdes</a>	<a href="#">RKPDes</a> <a href="#">APBDes</a>	
		7	Notulensi Penyusunan regulasi		<a href="#">rkpdes</a>	<a href="#">APBDes</a>	<a href="#">RKPDes</a> <a href="#">APBDes</a>
		8	Daftar Hadir Penyusunan regulasi		<a href="#">rkpdes</a> <a href="#">apbdes</a>	<a href="#">RKPDes</a> <a href="#">APBDes</a>	
		9	Dokumentasi Penyusunan regulasi		<a href="#">rkpdes</a> <a href="#">apbdes</a>	<a href="#">RKPDes</a> <a href="#">APBDes</a>	<a href="#">RKPDes</a>
		10	Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)	<a href="#">SPJ bumdes</a>		<a href="#">SPJ BUMDes</a> <a href="#">SPJ BUMDESA</a>	
	1.2 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	1	SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur		<a href="#">perdes sotk</a>	<a href="#">perdes sotk</a>	
		2	Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa		<a href="#">perdes</a>	<a href="#">PERPET</a>	
		3	Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparat desa		<a href="#">undangan</a>	<a href="#">undangan</a>	
		4	Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi		<a href="#">notulen, hadir, dokumentasi</a>	<a href="#">notulen HDR dok 22</a>	
		5	Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)		<a href="#">formulir</a>	<a href="#">formulir</a>	
	1.3 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan	1	Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan		<a href="#">perdes</a> <a href="#">formulir laporan SK UPG</a> <a href="#">SE no gratifikasi</a>	<a href="#">perpet</a> <a href="#">formulir laporan SK UPG</a>	
		2	Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparat desa		<a href="#">undangan</a>	<a href="#">undangan</a>	
		3	Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi		<a href="#">notulen, hadir, dokumen</a>	<a href="#">notulen HDR dok 22</a>	
		4	Format lampiran deklarasi Col	<a href="#">perpet dok benturan kepentingan</a> <a href="#">SE himbauan petinggi</a> <a href="#">form benturan kep</a>	<a href="#">perpet benturan kepentingan</a> <a href="#">dokumen benturan kepentingan</a> <a href="#">dokumen SE Petinggi</a> <a href="#">form lap benturan kepentingan</a>	<a href="#">PERPET BENTURAN KEP</a> <a href="#">dok benturan kep</a>	
	1.4 Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa	1	Perencanaan Pengadaan terkait PBJ -- tolong disusun secara rapi dari Rencana Kebutuhan , Survey harga, standarisasi, RAB		<a href="#">BKPDes 2023</a> <a href="#">APBDes 2023</a>	<a href="#">RKPDes 2022</a> <a href="#">APBDes 2022</a>	<a href="#">RKPDes 2021</a> <a href="#">APBDes 2021</a>
		2	KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa		<a href="#">KAK</a>	<a href="#">KAK</a>	
		3	Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku		<a href="#">undangan</a>	<a href="#">undangan</a>	
		4	surat penawaran dari Penyedia Jasa		<a href="#">Penawaran 2023</a>	<a href="#">Penawaran 2022</a>	
		5	SK Tim Pelaksana Kegiatan		<a href="#">SK TPK 2023</a>	<a href="#">SK TPK 2022</a>	<a href="#">SK TPK 2021</a>
		6	Perjanjian Kerjasama -- tambah surat penetapan penyedia (berdasarkan daftar harga yang masuk di desa) tahun 2022 dan 2023		<a href="#">surat penetapan SPK 2023</a> <a href="#">Rabat beton RT 18</a>	<a href="#">surat penetapan SPK 2022</a> <a href="#">rabat beton barat lapangan</a>	
		7	Dokumen penyelesaian pembayaran		<a href="#">Senderan RT 23</a>		
	1.5 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya	1	Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas		<a href="#">Perpet Pakta Integritas</a>	<a href="#">Perpet Pakta Integritas 2022</a>	
		2	Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa		<a href="#">Pakta Integritas</a>	<a href="#">Pakta Integritas</a>	
		3	Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparat desa		<a href="#">undangan</a>	<a href="#">undangan 2022</a>	
		4	Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi		<a href="#">notulen dll</a>	<a href="#">notulen dll 2022</a>	
II Penguatan Pengawasan	11.1 Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	1	Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh perangkat Desa dan Aparatur desa	<a href="#">sdh</a>	<a href="#">undangan</a>	<a href="#">Undangan</a>	
		2	Notulensi kegiatan	<a href="#">sdh</a>	<a href="#">notulensi</a>	<a href="#">Notulen</a>	
		3	Daftar hadir	<a href="#">sdh</a>	<a href="#">daftar hadir</a>	<a href="#">Daftar Hadir</a>	
		4	Dokumentasi	<a href="#">sdh</a>	<a href="#">dokumentasi</a>	<a href="#">Dokumentasi</a>	
		5	Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)	<a href="#">ada</a> <a href="#">ada</a> <a href="#">ada</a>	<a href="#">Kinerja Perangkat perdes kinerja PD</a> <a href="#">ABSENSI PERANGKAT DESA TH 2023</a>	<a href="#">pernet</a> <a href="#">ABSENSI</a>	
		11.2 Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah	1	Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah	<a href="#">suket dinsa ada</a> <a href="#">monev blm ada</a>	<a href="#">Suket Dinsos</a> <a href="#">MONEV KFC</a> <a href="#">monitoring TA</a>	
			2	Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan		<a href="#">pembinaan dinsa permasdes</a>	<a href="#">bukti pernyataan</a>
			3	Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung	<a href="#">temuan BPK</a> <a href="#">tindak lanjutnya</a>	<a href="#">inspektorat propinsi</a> <a href="#">Tanggapan Pemd</a>	
		11.3 Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi	1	Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten	<a href="#">blm jadi</a>	<a href="#">pernyataan petinggi</a>	
			2	Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab	<a href="#">ada</a>	<a href="#">surat polsek</a>	
3			Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut	<a href="#">ada</a>	<a href="#">SS tipikor 2023</a>	<a href="#">SS tipikor 2022</a>	
4			Surat pernyataan diupload ke website desa	<a href="#">blm</a>	<a href="#">Web Desa</a>	<a href="#">Web Desa</a>	
III Penguatan Kualitas	III.1 Adanya Layanan			<a href="#">Link disini</a>			

	Pelayanan Publik	Pengaduan bagi Masyarakat	1	Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindak lanjut pengaduan	SOP Pengaduan Tindak Lanjut Aduan 2023	SOP Pengaduan Tindak Lanjut aduan 2022	
			2	Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional)	Website Whats App (Grup WAG ) aduan online Buku Aduan Masyarakat 2023 Buku Aduan Masyarakat 2022 SOP Pengaduan	Buku Aduan 2022	
			3	Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan	SOP Lokasi Publikasi Grup WA Layanan Aduan Aduan 2022 Aduan 2023		
			4	Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan	Tindak Lanjut Aduan 2022 Tindak Lanjut Aduan 2023 Sarana Aduan Masyarakat Lewat Media Sosial dan Website Publikasi SOP		
		III.2	Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa	1	Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan	SK tim survey SS survey	
				2	Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017 yang berlaku).	Rekapitulasi Kinerja link survey	
		III.3	Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan).	1	Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017	SK PETINGGI Poster Website facebook	SK Petinggi Poster Website facebook
				2	Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)		
		III.4	Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat	1	Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan d. Kontak aduan (konvensional dan digital)	link disini link disini link disini pengaduan	infografis 2022 prioritas infografis 2022 pengaduan
				2	Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho) b. Dusun (poster atau baliho) c. Website d. Media sosial e. lainnya	link disini link disini link disini facebook	infografis 2022 baliho dusun website facebook
		III.5	Adanya Maklumat Pelayanan	1	Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku	Maklumat	
				2	Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa b. Konsekuensi hukum c. Ditandatangani oleh Kepala Desa	Maklumat Maklumat Maklumat TTD	
				3	Maklumat Pelayanan Dicitak dengan minimal ukuran poster		
					Lokasi Pemasangan: a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun b. Di upload di Website dan media sosial	Maklumat di Balai Desa Maklumat di Website facebook	
IV	Penguatan Partisipasi Masyarakat	IV.1	Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa	<b>I. Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)</b>			
				1	Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok	undangan musdus 2024	undangan undangan
				2	Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta)	Notulen 2024	notulen notulen
				3	Daftar hadir		daftar hadir daftar hadir
				4	Dokumentasi		dokumentasi dokumentasi
				<b>2. Musyawarah desa:</b>			
				5	Undangan kepada masyarakat desa	UNDANGAN	undangan undangan
				6	Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa)		notulen notulen
				7	Daftar hadir	musdes 2023	daftar hadir daftar hadir
				8	Dokumentasi		dokumentasi dokumentasi
				9	SK Tim Penyusun RKPDes	SK TIM RKPDES	sk tim rkpdes sk tim rkpdes
		IV.2	Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan	1	Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi	survey perilaku baik SK Tim Survei SURVEY PERILAKU MASYARAKAT SURVEY PERILAKU MASYARAKAT SURVEY PERILAKU MASYARAKAT SURVEY PERILAKU MASYARAKAT	survey perilaku baik sSK Tim Survei SURVEY PERILAKU MASYARAKAT SURVEY PERILAKU MASYARAKAT SURVEY PERILAKU MASYARAKAT SURVEY PERILAKU MASYARAKAT
				2	Hasil rekapitulasi, analisis dan tindak lanjut	Rekap dan analisis survey Surat Edaran	Rekap dan analisis survey Surat Edaran

			3 Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan		<a href="#">SE no gratifikasi</a>		
			4 Sosialisasi Perkaes secara fisik kepada masyarakat:		<a href="#">dokumentasi</a>	<a href="#">dokumentasi</a>	
			a. undangan		<a href="#">undangan</a>	<a href="#">undangan</a>	
			b. daftar hadir		<a href="#">daftar hadir</a>	<a href="#">daftar hadir</a>	
			c. notulensi	blm ada	<a href="#">notulensi</a>	<a href="#">notulensi</a>	
			d. dokumentasi	blm ada	<a href="#">dokumentasi</a>	<a href="#">dokumentasi</a>	
			e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan)	blm ada	<a href="#">testi pelayanan</a>	<a href="#">testi</a>	
			5 Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan)		<a href="#">dokumen benturan kepentingan</a>	<a href="#">dok benturan kep</a>	
	IV.3	Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 Undangan / pengumuman kepada masyarakat		<a href="#">undangan</a>	<a href="#">undangan</a>	
			2 Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa)		<a href="#">notulen</a>	<a href="#">notulen hdr dok 22</a>	
			3 Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir		<a href="#">terima upah RB lapangan</a>		
					<a href="#">terima upah RB RT 18</a>		
					<a href="#">terima upah senderan RT 23</a>		
			4 LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa	blm ada	<a href="#">LPJ RB Lapangan</a>		
					<a href="#">LPJ RB RT 18</a>		
					<a href="#">LPJ senderan RT 23</a>		
V	Kearifan Lokal	V.1 Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	1 Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai		<a href="#">Pelaksanaan Sedekah Bumi</a>		
			- Catatan kekurangan desa contoh :				
			a Bukti dokumen kesenian/adat istiadat belum dilengkapi dengan artikel narasi 9 nilai antikorupsi		<a href="#">Sedekah Bumi</a>		
			b Belum ada bukti dukung upload di website dan media sosial resmi milik desa		<a href="#">dokumentasi</a>	<a href="#">dokumentasi</a>	
			c 3. Belum ada bukti dukung Konfirmasi /testimoni masyarakat mengenai budaya lokal/hukum adat yang menggambarkan 9 nilai antikorupsi				
			2 Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat		<a href="#">SK Sedekah Bumi</a>	<a href="#">SK Sedekah Bumi 2022</a>	
		V.2 Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	1 SK Penetapan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi		<a href="#">SK Petinggi</a>	<a href="#">SK Petinggi</a>	
			2 Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan		<a href="#">Testimoni Toma</a>	<a href="#">TESTI</a>	
			3 Bukti diupload diwebsite dan media sosial		<a href="#">Testimoni Toma</a>		
					<a href="#">testimoni</a>		
			4 Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi		<a href="#">Sosialisasi Perempuan</a>		
					<a href="#">Sosialisasi</a>		